BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Daerah diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola administrasi perpajakan, mengoptimalkan potensi objek pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Kedua, Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0.0002. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan Retribusi Daerah diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga efektivitas penyelenggaraan layanan publik, pemanfaatan aset daerah, serta pengelolaan objek retribusi menjadi faktor yang turut mendukung penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah, meskipun pengaruhnya relatif lebih kecil dibandingkan Pajak Daerah.

Ketiga, Proyek Strategis Nasional tidak mampu memoderasi pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0.3885. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan Proyek Strategis Nasional belum mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh Pajak Daerah

terhadap Pendapatan Asli Daerah secara signifikan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan PSN saja belum cukup untuk memperkuat hubungan tersebut karena manfaat ekonomi yang dihasilkan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam basis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Keempat, Proyek Strategis Nasional tidak mampu memoderasi pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0,5327. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan Proyek Strategis Nasional belum mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara signifikan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan PSN saja belum cukup untuk memperkuat hubungan tersebut karena aktivitas ekonomi yang dihasilkan belum mampu meningkatkan pemanfaatan layanan dan fasilitas publik yang menjadi objek Retribusi Daerah secara optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan dan pengembangan akademik yang dapat diimplementasikan.

1. Bagi Penelitian Selanjutnya, disarankan untuk menggunakan pendekatan penelitian yang lebih mendalam, baik melalui metode kualitatif maupun pengembangan model kuantitatif. Pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk menggali lebih lanjut mengenai mekanisme hubungan antara keberadaan PSN dengan kapasitas fiskal daerah, termasuk faktor yang menyebabkan manfaat PSN belum sepenuhnya tercermin dalam penerimaan daerah. Sementara itu, penelitian kuantitatif selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan

indikator PSN yang lebih beragam, seperti jenis proyek, tahapan pembangunan, maupun tingkat keterkaitan proyek dengan aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain, seperti kualitas tata kelola daerah, kapasitas kelembagaan, dan faktor ekonomi regional untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor yang memengaruhi PAD.

2. Bagi Pemerintah Daerah, diperlukan penguatan kapasitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan kualitas administrasi penerimaan, digitalisasi sistem perpajakan, integrasi data ekonomi daerah, serta penguatan pengawasan objek pajak guna mengoptimalkan potensi penerimaan daerah. Selain itu, optimalisasi Retribusi Daerah perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan aset dan fasilitas daerah, serta inovasi layanan agar pemanfaatan layanan publik meningkat dan penerimaan retribusi yang diperoleh sejalan dengan manfaat yang diterima masyarakat.
3. Bagi Pemerintah Pusat, diperlukan penguatan evaluasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyelesaian proyek, tetapi juga menciptakan keterkaitan dengan aktivitas ekonomi daerah. Evaluasi PSN perlu mempertimbangkan sejauh mana aktivitas ekonomi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan basis penerimaan pemerintah daerah, sehingga manfaat pembangunan tidak hanya tercermin pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.